

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Pedoman Transliterasi Penulisan Skripsi*, <https://fasih.uinsatu.ac.id/download/category/2-dokumen-skripsi>, diakses pada 10 Januari 2024, pukul 19.06 WIB.
- R. Soesilo, *Hukum Tata negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 8
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, QS Al Araf Ayat 10
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Widiyanata, *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,) Hlm 123
- Sumarto, "*Hukum Tata negara*, Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan
- Kemendagri RI tanggal 19 September, 2018. Hlm 2
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Garut: CV Penerbit J-Art, 2011). hlm 12
- Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet.2 (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019)., hlm 23
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Garut: CV Penerbit J-Art, 2011). hlm 12
- Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008). hlm 25
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). hlm 54
- Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Bandung: Erlangga, 2008), hlm 200.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Garut: CV Penerbit J-Art, 2011).hlm 12
- Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Bandung: Erlangga,2008), hlm 200.
- Peter S & Yeni S. 2009. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern Press.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78
- Hanif nurcholis *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta,2005, hlm 66.
- Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997).*
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.*
- Ridwan HR dan SF Marbun. 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. (Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000), h. 1-2.*
- Labolo M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.F. Strong, 2012, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Eisting Form (Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Study Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie), Nusamedia, Bandung.*
- Widjaja, A.W. 2014. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Radusunrafindo Perada.
- R.Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung : Alumni, 2010).
- Saparin, Sumber. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utang Rosidin,*Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah,Pustaka Setia,Bandung, Hlm 3.*

“Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 6”

Dapartemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).hlm 23

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 135 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Chabib Sholeh, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), hlm.78

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang 2021 Badan Usaha Milik Desa.
Widiyanata, *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,) Hlm 123

Rohman Naufal, “Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes,” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah*, Volume, 8 Nomor 2 (Oktober 2014), hlm 44

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet-7, 2009), hlm. 93

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 157

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja lGrafindo Persada, 2001), hlm. 101-102

John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 215

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 101-102

Mahmud, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka setia, 2014). Hlm 68

Supardi, *Metode Penelitian hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.136

Abdurrahman dan Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104-105

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. 32

Mahmud, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka setia, 2014). Hlm 68

<https://www.desapujonkidul.my.id/> , pada 17 septmber 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Udi Hartoko Kepala desa Pujon Kidul Pada 1 Oktober 2024

Hasil wawancara dengan andriko direktur Bumdesa Pujon Kidul pada 1 Oktober 2024

Hasil wawancara dengan Bella Masyarakat desa Pujon Kidul pada 1 Oktober 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Tika Masyarakat desa Pujon Kidul pada 1 Oktober 2024

Hasil wawancara dengan Badowi Masyarakat desa Pujon Kidul pada 1 Oktober 2024

Hasil Observasi di Desa Pujon Pada 1 Oktober 2024

Moch Solekhan, 2014. “*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*”, Malang, Setara Press, hlm 56.

<https://www.bumdesmitrasejati.com/2021/08/enam-prinsip-pengelolaan-bumdesa-sesuai.html> diakses pada pukul 20.12 tanggal 2 januari 2024

Irwani, Bahriannor, Pengelolaan BUMDes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa diDesa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. (*Jurnal*

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (Prodi Administrasi Negara), hlm., 43.
Peraturan Desa Sumber Asri Nomor Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat (6).

Irwani, Bahriannor, Pengelolaan BUMDes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa diDesa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. (*Jurnal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Prodi Administrasi Negara*), hlm., 43.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 11 tahun 2021 tentang Desa Wisata Pasal 23

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/> diakses pada tanggal 1 januari 2024 pukul 09.23 WIB

Hasil Observasi di Desa Pujon Kidul Pada 1 September 2024

Hasil Observasi di Desa Pujon Kidul Pada 1 September 2024

Hasil Observasi di Desa Pujon Kidul Pada 1 September 2024

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*.hlm 23

Abu Bakar Al-Ahdali Al-Yamani, *Al-Faraid al-Bahiyyah*, hlm.27